



Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah 2,8 M Lebih di Desa Adat Mengwitani

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta kembali menggelontor dana hibah secara langsung kepada masyarakat. Kali ini Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan hibah Tahun Anggaran 2016 kepada masyarakat di Desa Adat Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Minggu (6/11) di depan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Mengwitani. Besarnya bantuan yang diserahkan mencapai Rp. 2.845.000.000,-. Acara tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria, Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra beserta Tripika Kecamatan Mengwi, serta Krama Desa Adat Mengwitani.

Bendesa Adat Mengwitani I Putu Wendra didampingi Perbekel I Putu Sumardita, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Badung dan Pemkab Badung yang telah memberikan bantuan dana yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan di Pura Khayangan Tiga, di Banjar-banjar maupun untuk mensupport sekaa-sekaa seni lainnya di Desa Adat Mengwitani. "Kami atas nama krama Desa Adat Mengwitani berterima kasih kepada Bapak Bupati. Semoga melalui kucuran dana ini akan mampu meningkatkan pembangunan dan kegiatan seni budaya di Desa Adat Mengwitani," tambahnya.

Bantuan dana yang diserahkan kepada Desa Adat Mengwitani terdiri dari bantuan untuk Banjar Adat Jumpayah 700 Juta, PKK Sekaa Kidung Banjar Jumpayah 175 Juta, Pura Kahyangan Anyar di Banjar Adat Dajan Peken 1,6 M, Pembangunan Banjar Adat Loda Pura 200 Juta, Pura Mrajapati Setra Gandamayu Pupuan 100 juta, Yowana Putra Waringin Banjar Adat Dukuh Gong 25 juta, Bhakti Negara Ranting Nyuhgading 25 juta dan Sekaa Gong Anak-Anak Banjar Adat Panca Warga 20 juta. Total bantuan dari dana hibah 2.845.000.000,-

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menekankan, bahwa Pemkab Badung telah memiliki RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Terdapat lima bidang menjadi skala prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat Badung. Terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, pelestarian seni, adat, agama dan budaya serta pariwisata. Dijelaskan, dibidang kesehatan, masyarakat di beri Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Badung Sehat, seluruh biaya berobat akan ditanggung



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menyerahkan bantuan hibah Tahun Anggaran 2016 kepada masyarakat di Desa Adat Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Minggu (6/11) di depan Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Mengwitani.

penuh pemerintah. Di pendidikan, kelas 6 SD akan diberikan laptop, sedangkan di tahun 2017 murid baru SD kelas 1 dan SMP kelas 1 diberi seragam lengkap. Dan dipastikan mulai 2017 tidak ada pungutan di sekolah. Dibidang seni, adat, agama dan budaya, diprioritaskan pembangunan di pura khayangan tiga termasuk mendukung pembangunan di Pura Paibon. Sekaa-sekaa seni di banjar-banjar akan diberdayakan. Bupati juga mengakui masih ada masyarakat Badung yang masih menyangand status Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk itu mulai tahun 2017 akan dibantu per orang Rp. 50 juta, dan diharapkan RTM di Badung tuntas di 2018.

Mengenai bantuan dana hibah ini kata Bupati, bantuan hibah ini merupakan kebijakan Pemkab Badung bersama DPRD Badung dalam upaya program percepatan pembangunan di Kabupaten Badung. "Kami Pemkab bersama Dewan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung," terangnya. Kepada masyarakat pengguna hibah, Bupati mengharapkan dapat memanfaatkan sesuai dengan tatanan regulasi dan aturan yang berlaku. "Pemanfaatannya harus by name by address, yang mana dibantu itu harus dibangun, tidak boleh dialihkan kepada yang lain," jelasnya. Diharapkan, penggunaanya harus selesai di bulan Desember ini. Demikian pula untuk pelaporannya, Bupati mewajibkan sudah ada laporan pertanggungjawaban pada tanggal 10 Januari 2017 nanti. (adv)

Edisi : Senin 7 Nov 2016

Hal : 8



Radar Bali

Empat Kasus Badung Mangkrak

DENPASAR - Pemberantasan korupsi di Bali masih tumpang tindih. Ini bisa dilihat dari penanganan perkara korupsi di seluruh kabupaten/kota di Bali. Di antara sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Badung ada beberapa kasus yang mangkrak, tak jelas kelanjutan penanganannya.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi di Badung selalu kandas di tengah jalan. Entah apa pemicunya, Kejari Denpasar dan Kejati Bali seperti tak bergigi saat menangani dugaan korupsi di Badung.

Sejumlah pejabat di lingkungan Kejati Bali dan Kejari Denpasar, pada koran ini menyebut lemahnya Kejari dan Kejati bu-

kan tanpa sebab. "Pimpinan serba sungkan dengan Badung. Ya, tahu sendiri lah, "dunia persilatan" di Badung seperti apa," ujar sumber koran ini di Kejaksaan, yang meminta agar tidak dikorbankan namanya, kemarin (4/11).

Jaksa lain, pada koran ini mengaku tidak bisa berbuat banyak karena merasa Kabupaten Badung disebut banyak membantu Kejaksaan. Badung cukup royal menggelontorkan bantuan pada Kejaksaan. Salah satunya bantuan hibah berupa mobil dinas.

Banyaknya pemberian dari Badung inilah yang diduga menyandera Kejaksaan ■

► Baca Empat... Hal

Kusumayasa Sebut Jaksa Profesional

■ EMPAT...

Sambungan dari hal 21

"Serba sukeh (serba sulit, Red), Badung terlanjur baik," imbuh sumber koran ini.

Di sisi lain, catatan koran ini setidaknya ada empat kasus besar potensi korupsi di Badung yang lenyap penanganannya. Pertama adalah kasus dugaan *mark up* anggaran *tirta yatra* ke India oleh PHDI Badung. Kejaksaan sempat turun mengambil data ke Badung pada Maret 2015.

Kejari Denpasar turun ke Badung karena berdasarkan temuan BPK RI ada kerugian negara atas agenda *tirta yatra* PHDI Badung. Kerugian negara mencapai ratusan juta. Namun, tiba-tiba kasus tersebut hilang tak berbekas.

Kasus yang juga kandas adalah laporan pungli Organda Badung awal tahun 2016. Kejati sempat memeriksa sejumlah pihak terkait. Tapi, lagi-lagi perkemban-

gan kasus tersebut macet. Kejati Bali beralih belum cukup bukti untuk mengarah pada perbuatan korupsi. Uang setoran sopir ke Organda bukan uang negara.

Yang tak kalah menghebohkan adalah kasus utang-piutang antara anggota DPRD Badung, Wayan Regep dengan pihak swasta bernama Made Mundra. Kasus tersebut menyeret Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta yang saat itu menjabat Ketua DPRD Badung.

Giri Prasta diperiksa Kejati Bali pada Januari 2015. Terseretnya nama Giri Prasta lantaran di balik utang-piutang tersebut ada dugaan jual beli izin pendirian perusahaan air minum di Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Saat itu, Regep sebagai Ketua Komisi A yang membidangi perizinan meminjam uang pada Mundra yang hendak membangun perusahaan air minum. Namun, kasus tersebut juga tak jelas

Edisi : Sabtu, 5 Nov 2016

Hal : _____



Radar Bali

penanganannya sekarang.

Kasus besar lain yang tak jelas kabarnya adalah dugaan pengemplangan Pajak Hotel dan Rostoran (PHR). Tahun 2014, Vila Ocean Blue di Kuta Selatan mengemplang pajak hingga puluhan miliar. Vila mewah milik investor Korea Selatan itu tidak membayar pajak selama beberapa tahun. Kasus ini sempat diendus Kejati Bali.

Namun, pada awal Agustus 2016, mantan Aspidsus Kejati Bali yang menjabat Kajari Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri, menyatakan kasus Ocean Blue tidak dilanjutkan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan membantah jika ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Dikatakan, tidak ada pihak atau orang yang kebal hukum. Kejaksaan akan bergerak jika memang ada data dan alat bukti

kuat. "Kalau alat buktinya tidak kuat, kami tidak bisa serta merta memaksakan," terang Ashari.

Ditanya hibah mobil dari Badung, Ashari mengaku tidak bisa memastikan. Tapi, dia menyebutkan mobil operasional di Kejati rata-rata sudah berumur. "Mobil yang baru rata-rata tahun 2010. Itu saja yang saya tahu," imbuh Ashari singkat.

Sementara Kasi Intel Kejari Denpasar, IGN Agung Kusumayasa Diputra, juga mengaku tidak tahu ada hibah mobil baru dari Pemkab Badung. "Saya malah belum tahu," katanya.

Namun, dikejar permintaan mobil baru yang disampaikan ke Pemkab Badung oleh Kajari, Kusumayasa mengatakan belum ada tindak lanjut. Namun, mantan Kasi Intel Kejari Singaraja, itu menyatakan tidak ada sangkut paut antara hibah dengan penanganan hukum. "Kami profesional dalam bekerja," tukasnya. (san/pit)

Edisi : Sabtu, 5 NOV 2016

Hal : _____



Eksekusi Lambat,

Kejari Disorot

Terkait Kasus Solar Bersubsidi PT Sembilan Pilar

DENPASAR - Kinerja Kejari Denpasar kembali mendapat sorotan. Ini karena jelas-jelas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI sudah turun, kejari tak kunjung melakukan eksekusi terhadap barang bukti (BB) kasus

pencurian BBM solar bersubsidi oleh PT Sembilan Pilar I.

Tarik ulur eksekusi Sembilan Pilar ini dinilai aneh. Sikap Kejari Denpasar ini diduga janggal karena tidak berani cepat mengeksekusi. Padahal, barang bukti yang harus dieksekusi kejari cukup banyak. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Di antaranya adalah enam unit mobil tangki, dan sejumlah

peralatan seperti pompa minyak. Selain itu, juga ada 38.400 ton BBM jenis solar. Pantauan *Jawa Pos Radar Bali*, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) Jalan Ratna, Denpasar, tampak enam unit tangki terparkir berjajar.

Di bagian lambung tertulis Sembilan Pilar. Secara kasat mata enam mobil dalam kondisi tak terawat. "Sudah ada putusan, harusnya secepatnya putusan itu dilakukan"

MASIH PARKIR : Barang bukti dua di antara sejumlah mobil PT Sembilan Pilar di Rupbasan Jalan Ratna, Denpasar. Sikap Kejari Denpasar kini dipertanyakan.

► Baca *Eksekusi...* Hal 31

Edisi : Sabtu, 5 Nov 2016

Hal : 21



Kasipidum Mengaku akan Eksekusi Secepatnya

■ EKSEKUSI...

Sambungan dari hal 21

Apalagi sudah ada salinan dari pengadilan. Tidak ada lagi alasan menunda eksekusi," beber Koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan

(AMUK) Nyoman Mardika, kemarin (3/11).

Ditambahkan Mardika, lambatnya eksekusi Kejari Denpasar patut dipertanyakan. Sebab, selama ini Kejari Denpasar terkesan melempem terhadap kasus PT Sembilan Pilar I.

AMUK sendiri pernah *ngeluruk* Kajari Denpasar ketika masih dipimpin Imanuel Zebua. AMUK menanyakan keberadaan barang bukti PT Sembilan Pilar I yang misterius.

"Ketika itu kejaksaan ber-

dalih belum ada putusan resmi dari MA. Sekarang sudah ada putusan resmi, tapi tidak dilaksanakan. Ini patut diduga ada sesuatu. Wajar *kan* kami menduga, kalau ada yang tak wajar?" tandas pria asal Sese-tan, Denpasar itu.

Ditegaskan Mardika, salinan putusan MA yang dikirim PN Denpasar semestinya sudah dijadikan dasar eksekusi oleh kejaksaan. Salinan tersebut sudah sah. Eksekusi Dirut PT Sembilan Pilar I, I Made Wirata juga tak jelas.

Selain menyoroti lambannya eksekusi BB, Mardika juga menyoal keberadaan barang bukti. Ditegaskan Mardika, barang bukti yang harusnya dirampas untuk negara harus masih dalam kondisi utuh. Seperti 38.400 ton solar. "Sekarang barang bukti itu masih ada tidak? Ini yang harus ditunjukkan kejaksaan. Kejaksaan harus transparan," sentilnya.

Sementara itu, Kasipidum Kejari Denpasar Ketut Maha

Agung, saat dikonfirmasi terpisah tidak membantah bahwa belum melakukan eksekusi. "Belum. Nanti, secepatnya," ujar Agung.

Saat ditanya kapan secepatnya, Agung tak bisa memastikan. Dia berdalih ada perintah dari Kajari langsung agar eksekusi dilakukan setelah ada petikan resmi putusan dari MA. "Pimpinan (Kajari Denpasar, Red) bilang nanti sekalian kalau petikannya sudah turun," kelitnya.

Kembali didesak salinan putusan MA yang sudah dikirim PN Denpasar apakah tidak cukup, Agung menyebut harus menunggu petikan resmi dari MA. "Pokoknya ada petikan

resmi langsung kami eksekusi," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, kasus pencurian BBM bersubsidi dengan terdakwa Dirut PT Sembilan Pilar, I Made Wirata sejak awal penanganannya sarat kontroversi. Dalam putusan, MA menolak kasasi terdakwa Wirata dan mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa.

Putusan MA itu menguatkan tuntutan jaksa, yang menuntut terdakwa Wirata dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 2 miliar, subsider 6 bulan kurungan. Tapi barang bukti sebagian (kapal tanker beserta solar) dikembalikan ke terdakwa Wirata. (san/pit)

Edisi : Sabtu, 5 NOV 2016

Hal : 31